

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pertanian berperan strategis dalam perekonomian nasional. Peran strategis tersebut ditunjukkan oleh perannya dalam pembentukan kapital, penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bioenergi, penyerap tenaga kerja, sumber devisa negara, dan sumber pendapatan, melalui praktek wirausaha tani (Rivai & Anugrah, 2020).

Sektor pertanian masih menjadi lapangan pekerjaan yang paling banyak menyerap tenaga kerja domestik. Menurut Badan Pusat Statistik (Pertanian, 2020) terdapat 40,64 juta pekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada Februari 2022. Jumlah itu persennya mencapai 29,96% dari total penduduk bekerja yang sebanyak 135,61 juta jiwa, sekaligus menjadi yang terbesar dibanding lapangan pekerjaan utama lainnya. Pembangunan pertanian di Indonesia diarahkan menjadi pertanian berkelanjutan yang merupakan bagian dari pembangunan yang berkelanjutan.

Kewirausahaan adalah salah satu bagian terpenting dari pembangunan pertanian karena mendorong inovasi dan pemikiran proaktif tentang tren masa depan (Mayang, 2023). Dalam bertani, seringkali ada musim dan perubahan ekonomi yang menjadikan kewirausahaan sebagai suatu keharusan. Pertanian merupakan sektor usaha yang menguntungkan ketika dikelola dengan konsep kewirausahaan yang kreatif dan inovatif yang berorientasi keberlanjutan usaha ekonomi (*profit*), keberlanjutan kehidupan sosial manusia (*people*), dan keberlanjutan ekologi alam (*planet*) (Ratten, 2018). *Agropreneur* melihat pertanian mereka sebagai bisnis. Dalam perspektif berorientasi sumberdaya, kewirausahaan dilihat sebagai upaya untuk melakukan akuisisi terhadap sumberdaya. Sumberdaya yang unik dianggap dapat mengembangkan kewirausahaan pada suatu wilayah (Zahra, 2021). Sektor pertanian sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan, dan bersedia mengambil risiko yang diperhitungkan untuk membuat pertanian

menguntungkan dan bisnis mereka berkembang.

Relevansi yang lebih luas dari konseptualisasi kewirausahaan adalah mengeksplorasi pelaku wirausaha, peristiwa, proses, dan hasil yang berkaitan dengan wirausaha dan organisasi laba dan nirlaba untuk memanfaatkan peluang usaha berbasis sosial dan teknologi (Noruzi et al., 2010). Kewirausahaan pertanian sosial digital praktis dan relevan bagi masyarakat pedesaan karena kemampuan untuk memanfaatkan inovasi teknologi (Panda, 2023). Hal ini menyoroti pentingnya petani menginvestasikan lebih banyak sumber daya ke dalam kewirausahaan digital terutama mereka yang memiliki nilai sosial untuk daerah pedesaan (Ratten, 2018).

Berdasarkan telaah peneliti sebelumnya ada dua konsep/ model kewirausahaan yang diterapkan, yaitu kewirausahaan berbasis sosial (*sociopreneurship*), dan Kewirausahaan berbasis teknologi (*technopreneurship*) (Tenrinippi, 2019); (Sutanto & Nurrachman, 2018) (Dien Yudithadewi; Bonifasius Parikesit, 2020); (Sirine et al., 2020b); (Bunyamin et al., 2016a). Hal tersebut juga didukung dengan hasil penelitian terdahulu dengan menggunakan konsep *resource base view* (RBV) (Burvill et al., 2018) yang menunjukkan adanya kecenderungan penelitian RBV pada kewirausahaan terarah pada konsep *sociopreneurship* dan kewirausahaan berbasis teknologi dalam menciptakan daya saing usaha.

Pengembangan *sociopreneurship* didasari atas kerangka kerja penciptaan nilai bersama dan bersifat sukarela dengan pendekatan *social value*, *civil society*, *innovation*, *economic activity* (Mulyaningrum & Rusliati, 2019), dalam konteks tanggung jawab sosial untuk pertumbuhan berkelanjutan dan memaksimalkan potensi ekonomi lokal akan mewujudkan nilai ekonomi yang terlembaga dengan baik (Bunyamin, Purnomo, & Taofik, 2016). Motif dari *sociopreneurship* di bidang pertanian adalah atas dasar peluang usaha baru dalam berinovasi bagi *agropreneur* (Manyaka, 2015) yang membuat daerah pedesaan tetap hidup karena memanfaatkan potensi lokal (Hudcová et al., 2018); (Manyaka, 2015), dan didukung dengan komunikasi partisipatif yang terlembaga pada kelompok usaha

tani (Sutowo, 2020).

Techno-sociopreneurship merupakan proses pembentukan usaha baru yang melibatkan teknologi dengan harapan penciptaan strategi dan inovasi yang tepat akan membuat teknologi sebagai salah satu faktor untuk mengembangkan ekonomi (Annisa et al., 2020). *Techno-sociopreneurship* merupakan solusi untuk meningkatkan daya saing bangsa karena *techno-sociopreneurship* merupakan proses sinergi dari kemampuan yang kuat pada pengembangan ekonomi berkelanjutan (Mopangga, 2015a); (Syaifulloh, 2021).

Salah satu contoh inovasi wirausaha pertanian yang dilakukan di negara maju adalah dengan menggunakan konsep *platform based collaborative economy* (PBCE) atau ekonomi kolaborasi berbasis platform. Hal ini merupakan salah satu bentuk inovasi pemasaran produk pertanian pemanfaatan teknologi digital. PBCE merupakan sebuah model bisnis yang didorong oleh permintaan berdasarkan platform teknologi informasi. Salah satu dampak konsep *sociopreneurship* tanpa ada sentuhan teknologi di Eropa, Amerika latin dan negara berkembang adalah terjadinya penurunan populasi yang berprofesi sebagai petani sebesar 2% dan berpindah ke industri. Permasalahan tersebut dikarenakan keterbatasan biaya, keterampilan pada petani sehingga tidak mampu mengadopsi teknologi dalam meningkatkan nilai komoditas pertanian. Seharusnya dengan adanya perkembangan teknologi, sektor pertanian akan dapat mempengaruhi peluang kerja dan profil pekerjaan petani yang lebih professional. Contohnya adalah wirausaha pertanian yang memanfaatkan teknologi dalam praktek wirausaha (*Smart farming is key to developing sustainable agriculture*).

Pemanfaatan teknologi ini akan menawarkan jalan menuju pertanian berkelanjutan dengan diversifikasi teknologi, pengelolaan usaha tani, dan jaringan di semua pelaku sektor pertanian. Petani yang berhimpun dalam sebuah kelembagaan akan dapat mendukung dan memfasilitasi penggunaan teknologi yang tepat, dan berdampak pada penggunaan teknologi secara berkelanjutan untuk

memilih tindakan yang paling tepat di negara maju dan berkembang.

Kewirausahaan yang mengadopsi teknologi tepat untuk dikembangkan pada usaha komoditi pertanian. Wirausahawan yang memahami dan menguasai teknologi, kreatif dan inovatif berpotensi sukses dalam memanfaatkan peluang usaha tani yang memiliki sumberdaya yang besar (Mopangga, 2015). Kewirausahaan pertanian berbasis sosial dan teknologi praktis dan relevan bagi masyarakat pedesaan karena kemampuan untuk memanfaatkan inovasi teknologi. Penelitian ini menyoroti pentingnya petani menginvestasikan lebih banyak sumber daya ke dalam kewirausahaan yang mengadopsi teknologi yang memiliki nilai sosial untuk daerah pedesaan (Ratten, 2018).

Penerapan konsep *social entrepreneurship* dan *techno-sociopreneurship* penting untuk diterapkan pada kelembagaan ekonomi lokal. Dengan adanya perpaduan potensi sosial masyarakat dengan pemanfaatan perkembangan teknologi dalam berwirausaha pada sektor pertanian pada kelembagaan ekonomi lokal akan menciptakan sumber ekonomi baru bagi masyarakat pedesaan. *sociopreneurship* di sektor pertanian yang mampu menciptakan daerah pedesaan tetap hidup serta didukung sistem integrasi sosial di pedesaan (Hudcová et al., 2018).

Elinor Ostrom seorang pakar dalam studi kelembagaan, mendefinisikan kelembagaan ekonomi lokal mencakup aturan dan norma yang mengatur kegiatan ekonomi komunitas, seperti pasar lokal, koperasi, dan asosiasi perdagangan lokal (Ostrom, 1990). Kelembagaan ekonomi lokal merupakan kelembagaan yang mencakup berbagai bentuk organisasi lokal dan regulasi yang mempengaruhi aktivitas ekonomi dan praktik bisnis lokal (Ménard & Shirley, 2011; D. C. North, 1955). Karl Polanyi mengemukakan, bahwa kelembagaan ekonomi lokal adalah jaringan sosial dan budaya yang mendukung dan mempengaruhi aktivitas ekonomi di suatu daerah (Kassner, 2017). (Williamson, 2010) yang terkenal dengan teori biaya transaksi, berpendapat bahwa kelembagaan ekonomi lokal mengatur transaksi dan mengurangi biaya transaksi melalui mekanisme formal (seperti hukum dan regulasi) dan informal (seperti norma dan adat). Dalam ekonomi lokal, hal ini berarti bagaimana komunitas mengatur transaksi ekonomi untuk memaksimalkan efisiensi dan keadilan.

Penciptaan wirausaha baru khususnya di bidang pertanian menjadi sangat penting karena Indonesia mempunyai potensi besar di sektor agribisnis pertanian. Pertanian berperan sebagai mata pencaharian sebagian besar penduduk dan pertanian akan menjadi salah satu kegiatan unggulan pembangunan ekonomi nasional Indonesia. Dengan ditemukannya model kewirausahaan berbasis sosial dan teknologi berbasis kelembagaan ekonomi lokal ini akan memberikan referensi baru bagi semua *stakeholders* dalam mendorong tumbuhnya pelaku kewirausahaan terutama pada sektor pertanian.

Kewirausahaan berbasiskan kelembagaan ekonomi lokal pada kelompok tani di Sumatera Barat mempunyai peran yang kuat dalam mendukung keberlanjutan pertanian khususnya untuk memberikan masukan dan pertimbangan bagi pelaku pembangunan dalam rangka pengembangan ekonomi kelembagaan (Aini & Nadida, 2014). Berdasarkan penelitian terdahulu menjelaskan bahwa, ada beberapa ciri kelembagaan ekonomi lokal Sumatera Barat, diantaranya adalah: memiliki nilai-nilai bersama, dan partisipasi (Reza et al., 2019; Wahyuni, 2010), kepercayaan, nilai-nilai agama dan adat kekuatan internal (*mobilisasi modal internal*) (Johar, 2014), serta diperkuat dengan sistem nilai kepemilikan dan kekerabatan berdasarkan genealogis dari garis keturunan ibu (sistem matrilineal) (Noer, 2006) sudah ada sejak lama di Minangkabau (Rohaya, 2021). Dapat disimpulkan, bahwa ciri kelembagaan ekonomi lokal Sumatera Barat adalah Kekerabatan berdasarkan genealogis dari garis keturunan ibu (sistem matrilineal), kesamaan suku, kesamaan agama dan kesamaan budaya (Marzali, 2017; Munir, 2016; Noer, 2006; Scott, 1990; Sukmawati, 2019; Watson, 1995).

Kelembagaan dapat menggambarkan pola perilaku dan hubungan suatu organisasi tertentu dalam hubungannya dengan lingkungan atau sumber daya (Ruttan, 1984). Peran serta kelembagaan usaha pertanian diperlukan agar diperoleh hasil ekonomis yang lebih optimal sehingga dapat meningkatkan kinerja usaha tani yang dilandasi dengan jiwa kewirausahaan. Untuk meningkatkan nilai ekonomis pertanian perlu ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi digital salah satu cara untuk memaksimalkannya adalah potensi lokal yang didukung dengan pemberdayaan dan permodalan (Muryanti, 2020; Yuliani, 2019). Kelembagaan

ekonomi yang memperhatikan faktor lingkungan terutama mengenai budaya lokal akan memperkuat keberadaan usaha yang lebih berkelanjutan serta mampu menyelesaikan persoalan kemiskinan (Astawa, 2016; M. Efendi, 2017; Elisabeth, 2020; Robinson & Erasmus, 2009; Wibowo & Alhaqim, 2015).

Kelembagaan bisa dimaknai sebagai aturan dan organisasi atau lembaga. Lembaga merupakan organisasi yang bertujuan memaksimalkan kesejahteraan atau utilitas (D. North, 1990; Scott, 1990) yang diikat dengan adanya aturan tertulis, ketentuan, prosedur, struktur, tujuan dan strategi (Berelson & Steiner, 1964) dalam (Hakimi et al., 2019). Indonesia merupakan negara agraris karena sebagian besar atau mayoritas (40%) penduduknya bekerja di sektor pertanian (Ayun et al., 2020). Pertanian merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia untuk pembentukan pendapatan domestik bruto (PDB) nasional, penyerapan tenaga kerja, penyediaan pangan, penghasil devisa, dan tempat bergantung sebagian besar penduduk Indonesia. Besarnya luas lahan pertanian dan banyaknya petani serta melimpahnya produk pertanian sehingga Indonesia disebut sebagai negara agraris dan komoditas sayur pada tahun 2018 seperti bawang merah sejumlah 1,5 juta ton, kembang kol sebesar 0,152 juta ton, dan bayam sebesar 0,162 juta ton (Kumalasari, 2020).

Dengan potensi pertanian tersebut, masih sedikit penelitian terdahulu yang menjelaskan pentingnya kewirausahaan berbasis sosial dan teknologi (*techno-sociopreneurship*) pada kelembagaan ekonomi lokal. Alasan pentingnya kajian dari *techno-sociopreneurship* berbasis kelembagaan ekonomi lokal adalah, karena pertanian sebagai kekuatan utama ekonomi Indonesia sangat strategis sebagai basis kewirausahaan dimana konsep kewirausahaan ini akan memudahkan petani dalam memanfaatkan perkembangan teknologi dengan basis kelembagaan ekonomi lokal sebagai kekuatan utama dalam meningkatkan nilai ekonomi hasil pertanian pasca panen.

Temuan penelitian yang dilakukan oleh (Silvatika, 2020) *techno-*

sociopreneurship merupakan gabungan antara wirausaha teknologi dan wirausaha sosial. Skema model kolaborasi pengembangan *techno-sociopreneurship* adalah dengan sinergi akademisi, pelaku usaha, komunitas, pemerintah, dan media untuk mendukung ekosistem *sociopreneurship* dengan mengadopsi teknologi.

Pendekatan kewirausahaan di kawasan pertanian telah ada diantaranya berbentuk kemitraan petani dan pelaku usaha, tetapi belum berhasil menjadi solusi, sehingga hal ini mengakibatkan disharmonisasi antara pelaku yang berbentuk kelembagaan dengan pelaku yang terdiri dari usaha tani skala kecil (Yahya et al., 2013); (Buang & Suryandari, 2009). Pemahaman akan arti penting membangun kebersamaan melalui kegiatan produktif yang diwadahi dalam kerangka organisasi relatif masih rendah, pembangunan kawasan pertanian masih bersifat *output oriented* (Arsanti, 2013); (Rusastra et al., 2005). Berdasarkan hal tersebut maka, kemandirian petani perlu dibangun melalui kewirausahaan petani berbasis kelembagaan ekonomi lokal dengan mengadopsi aspek sosial dan teknologi sebagai model meningkatkan skala usaha.

1.2 Rumusan Masalah

Pertanian merupakan sektor ekonomi yang strategis di Sumatera Barat untuk dijadikan sebagai tumpuan utama untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data BPS tahun 2023 menjelaskan, bahwa sektor pertanian di Sumatera Barat merupakan sektor lapangan kerja informal terbesar yaitunya sebesar 88,85% (BPS, 2024). Berdasarkan hasil kajian penelitian terdahulu belum banyak membahas tentang kelembagaan ekonomi lokal dalam memanfaatkan *sociopreneurship* dan memaksimalkan perkembangan teknologi dalam meningkatkan skala usaha, serta masih sedikit kajian yang menjelaskan tentang *techno-sociopreneurship* pada kelembagaan ekonomi lokal, dan yang menariknya adalah, hampir belum ada penelitian terdahulu yang membedakan penerapan manajemen wirausaha berskala industri besar dengan wirausaha berskala mikro dan kecil, sehingga menimbulkan pengelolaan usaha yang tidak optimal dalam pencapaian tujuan. Untuk mengatasi hal tersebut, maka

diperlukan inovasi pada usaha kelembagaan ekonomi lokal tersebut, sehingga kelembagaan tersebut mampu mengurangi *uncertainty* dalam adopsi penerapan manajemen kelembagaan usaha berskala besar ke manajemen kelembagaan ekonomi lokal pada usaha berskala mikro dan kecil.

Hasil survei pendahuluan yang dilakukan peneliti pada objek penelitian juga menunjukkan fenomena serupa. Pada bulan Desember 2022, peneliti melakukan observasi awal dengan metode wawancara terstruktur pada Koperasi KPSU Solok Radjo Nagari Air Dingin Kabupaten Solok dengan 5 *key person* sebagai pendiri dan pengelola KPSU Solok Radjo. Pertanyaan yang diajukan terkait konsep *techno-sociopreneurship* pada kelembagaan ekonomi lokal dengan variabel inovasi (kreativitas, inovasi pemasaran, inovasi teknologi dan inovasi keuangan), variabel kolaborasi (adaptasi, kepemimpinan, kemampuan mengelola usaha, kerjasama, dan kemitraan), variabel budaya (*entrepreneurial culture, supportive environment, public policy*), variabel kelembagaan lokal (kesesuaian karakteristik, efektivitas pelayanan, kemampuan mobilisasi modal internal, kebijakan pemerintah pada lembaga, asas kepercayaan, terbentuknya sistem jaringan, dan terbentuknya aturan norma), variabel pentahelix (sektor publik, swasta, akademisi, masyarakat sipil, wirausahawan, variabel personal/ *agropreneur (attitude, dan skill)*, dan variabel kontrol (*trust and commitment, communication, legitimacy, collaborative planning*).

Hasil observasi awal pada objek penelitian menunjukkan, bahwa dalam budidaya pertanian kopi, proses pengolahan kopi, pengelolaan keuangan dan promosi produk pasca panen membutuhkan inovasi dalam hal peralatan dan teknologi digital. Inovasi ini meningkatkan produktivitas dan efisiensi biaya, hal ini dibuktikan dengan peningkatan ekspor kopi sebesar 15 ton pada tahun 2022 meningkat 50 % dari tahun sebelumnya. KPSU Solok Radjo juara 3 *specialty coffee* tingkat dunia hal ini merupakan berkat kerjasama dengan berbagai *stakeholders*, seperti Dimitri perusahaan kopi internasional penyedia aplikasi *my coffee* berbasis digital, lembaga RPL binaan negara Belanda penyedia aplikasi *avenza* untuk pengelolaan petani kopi, Rabobank, Starbucks, Fili Konte Amerika, BI dan hutan

kelola masyarakat). Kesemua mitra tersebut berkolaborasi dalam hal penguatan proses bisnis dari hulu sampai hilir produk kopi Solok Radjo. KPSU Solok Radjo didirikan atas dasar ikatan kekeluargaan oleh 3 orang bersaudara dengan hanya berkebun kopi dan saat ini sudah berkembang menjadi 350 orang anggota dengan berbagai unit bisnis, yaitunya kebun budidaya kopi, ekspor kopi, agrowisata, dan *coffee shop*. Kemajuan KPSU Solok Radjo ini tidak terlepas dari adanya pengaruh kondisi budaya dan modal sosial masyarakat setempat sehingga secara langsung memberikan penguatan pada kelembagaan koperasi tersebut.

Koperasi KPSU Solok Radjo yang menjadi pelopor terbentuknya masyarakat perlindungan indikasi geografis kopi Sumatera Arabica Minang Solok (MPIG SAMS). Dengan keistimewaan rasa yang dimiliki oleh kopi Solok Radjo, maka sekarang kopi dari Kabupaten Solok ini telah mendapat sertifikasi indikasi geografis. Kopi yang diproduksi dengan standar yang sekarang ini hanya dimiliki oleh Solok Radjo. Rasa dan aroma yang dihasilkan tidak akan sama dengan kopi yang berasal dari daerah lain. Festival kopi yang pernah diikuti koperasi KPSU Solok Radjo di tingkat nasional dan tingkat internasional adalah *Roaster Choice Award* 2014, festival original kopi Sumatera Barat 2015, *Australian International Coffee Awards*. Pada tahun 2016 Koperasi Solok Radjo juga mendapatkan piagam penghargaan yaitu *2ND Runner-Up Syphon Category, Bronze Medal di Australian International Coffee Awards* dan *Silver Medaly di Australian International Coffee Awards*. Pada tahun 2017 juga mengikuti pameran kopi *specialty* di Seattle, Amerika Serikat.

Survey awal ini juga menjelaskan, bahwa pengelola dan anggota koperasi belum maksimal adopsi teknologi yang dimiliki, karena terkendala dengan sumber daya manusia anggota binaan koperasi yang belum merata baik. Untuk itu diperlukan pendampingan secara berkala. Contoh pendampingan yang dilakukan adalah bagaimana menggunakan aplikasi *my coffee* berbasis digital. Kelembagaan masih lemah, karena kondisi SDM pengelola yang belum maksimal dan hal ini juga berdampak pada inovasi yang belum maksimal. Kondisi sosial masyarakat setempat juga memberikan resistensi pada pengembangan unit bisnis, seperti glamping dan

wisata agro.

Dari fenomena yang ada pada ekonomi lokal (koperasi, kelompok tani, dan lainnya) semuanya berbisnis, tetapi skala usaha belum meningkat dari skala mikro kecil ke skala yang lebih besar, karena hanya berbicara tentang ekonomi saja. Berdasarkan persoalan tersebut perlu pendekatan sosial sehingga muncul *sociopreneurship*. Pendekatan *sociopreneurship* saja ternyata juga tidak cukup. Berdasarkan literatur yang dibaca model *sociopreneurship* saja tidak cukup untuk membuat skala ekonomi usaha kelembagaan ekonomi lokal ini menjadi lebih baik karena tidak optimal dalam *sosial innovation*. Penerapan *sosial innovation* akan lebih maksimal dalam meningkatkan skala usaha ketika mengadopsi teknologi dalam pengelolaan usaha. Untuk meningkatkan skala usaha kelembagaan ekonomi lokal diperlukan model *techno-sociopreneurship*.

Kenapa KPSU Solok Radjo yang dipilih sebagai objek penelitian, karena lembaga ekonomi lokal ini yang sudah mendekati dalam penerapan model *techno-sociopreneurship* dalam menjalankan usaha berbasis kelembagaan ekonomi lokal. Perlu dibuktikan *techno-sociopreneurship* itu bisa mengangkat perekonomian dari sektor pertanian yang sudah dikelola oleh kelembagaan ekonomi lokal. Dengan demikian, KPSU Solok Radjo menjadi fokus kajian dalam menerapkan pendekatan *techno-sociopreneurship* sebagai bentuk intervensi untuk memperkuat kelembagaan ekonomi lokal.

Berdasarkan permasalahan diatas maka, pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa KPSU Solok Radjo dikategorikan sebagai salah satu lembaga ekonomi lokal?
2. Bagaimana kontribusi *techno-sociopreneurship* dalam memperkuat kelembagaan ekonomi lokal melalui analisis pengaruh faktor-faktornya terhadap usaha KPSU Solok Radjo di Nagari Air Dingin Kabupaten Solok?

1.3 Tujuan

Tujuan dari Penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan mengapa KPSU Solok Radjo dikategorikan sebagai salah satu lembaga ekonomi lokal.
2. Untuk menjelaskan kontribusi *techno-sociopreneurship* dalam memperkuat kelembagaan ekonomi lokal melalui analisis pengaruh faktor-faktornya terhadap usaha KPSU Solok Radjo di Nagari Air Dingin Kabupaten Solok?

1.4 Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan baru mengenai pengembangan model *techno-sociopreneurship* yang berbasis kelembagaan ekonomi lokal dalam upaya meningkatkan skala usaha. Model yang dikembangkan dalam penelitian ini merupakan pendekatan yang belum banyak diungkap sebelumnya, khususnya dalam konteks pemberdayaan kelembagaan ekonomi lokal berbasis teknologi dan nilai-nilai sosial. Adapun manfaat penelitian ini bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) adalah sebagai berikut:

1. Bagi Wirausahawan Petani (*Agropreneur*):

Penelitian ini memberikan pengetahuan tambahan mengenai model pembentukan *techno-sociopreneurship* yang dapat diterapkan oleh para wirausahawan petani yang tergabung dalam kelompok atau lembaga ekonomi lokal. Dengan penerapan model ini, diharapkan mereka mampu meningkatkan skala usaha secara lebih terstruktur, inovatif, dan berkelanjutan.

2. Bagi Pemerintah:

Temuan dari penelitian ini dapat menjadi referensi baru dalam merumuskan kebijakan maupun regulasi yang berkaitan dengan pembinaan dan pemberdayaan kewirausahaan di tingkat lokal. Pemerintah dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk memperkuat program-program kelembagaan ekonomi masyarakat berbasis teknologi dan kolaborasi sosial.

3. Bagi Lembaga, Organisasi, dan Komunitas Terkait:

Penelitian ini juga memberikan wawasan tambahan bagi berbagai lembaga, organisasi, dan komunitas yang memiliki perhatian terhadap pengembangan usaha masyarakat. Melalui hasil penelitian ini, mereka dapat menjajaki berbagai bentuk inovasi dan kolaborasi dalam memperkuat kapasitas kelembagaan ekonomi lokal serta mendorong pertumbuhan usaha yang inklusif dan berdaya saing.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam ruang lingkup kajian kelembagaan ekonomi lokal, dengan fokus pada penerapan model *techno-sociopreneurship* di Koperasi Produsen Serba Usaha (KPSU) Solok Radjo, yang berlokasi di Nagari Air Dingin, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Ruang lingkup ini mencakup dua hal utama yang masing-masing dijawab melalui pendekatan metodologi yang berbeda. Pertama, untuk menjawab rumusan masalah terkait alasan mengapa KPSU Solok Radjo dikategorikan sebagai kelembagaan ekonomi lokal, digunakan pendekatan kualitatif. Metode ini melibatkan wawancara semi terstruktur terhadap informan kunci, dan observasi langsung. Fokus utamanya adalah mengidentifikasi karakteristik aspek jaringan sosial dan aspek budaya dalam konteks kelembagaan ekonomi lokal. Kedua, untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait kontribusi *techno-sociopreneurship* dalam memperkuat kelembagaan ekonomi lokal melalui analisis pengaruh faktor-faktornya terhadap usaha KPSU Solok Radjo di Nagari Air Dingin Kabupaten Solok, digunakan pendekatan kuantitatif. Dalam hal ini, penelitian menguji hubungan antara variabel inovasi, kolaborasi, dan budaya terhadap *techno-sociopreneurship*, serta dampaknya terhadap kelembagaan ekonomi lokal. Pengumpulan data dilakukan melalui survei terhadap 120 responden menggunakan teknik *simple random sampling*, dan dianalisis dengan metode *partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)*. Selain itu, dikembangkan pula *indeks efektivitas techno-sociopreneurship (IET)* untuk mengukur sejauh mana integrasi aspek inovasi, kolaborasi dan budaya telah mendukung peningkatan skala usaha koperasi.

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada satu studi kasus kelembagaan

ekonomi lokal, tanpa menggeneralisasi ke seluruh koperasi atau lembaga ekonomi Desa/Nagari lainnya. Penelitian ini juga tidak mengeksplorasi seluruh faktor eksternal atau lingkungan makro yang mungkin mempengaruhi efektivitas *techno-sociopreneurship*, melainkan hanya fokus pada tiga variabel pembentuk utama: inovasi, kolaborasi, dan budaya. Hasil dari pendekatan campuran ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam sekaligus bukti empiris tentang relevansi model *techno-sociopreneurship* dalam meningkatkan skala usaha kelembagaan ekonomi lokal.

1.6 Kebaruan (*Novelty*)

Berdasarkan hasil kajian penelitian terdahulu dalam rentang waktu 8 tahun terakhir, dapat dikemukakan kebaruan dalam penelitian ini. Kenapa usaha ekonomi pertanian dalam skala mikro dan kecil tidak maju dan berkembang, hal ini diindikasikan karena sektor usaha tersebut belum menerapkan pendekatan *techno-sociopreneurship*. Pendekatan *sociopreneurship* sudah banyak diterapkan pada kewirausahaan pertanian berskala mikro kecil, namun pendekatan *techno-sociopreneurship* sebagian besar hanya diterapkan pada usaha industri berskala menengah dan besar. Sektor usaha mikro dan kecil perlu untuk adopsi konsep *technopreneurship* dan *sociopreneurship* secara bersamaan dalam pemanfaatan teknologi untuk berinovasi yang disebut dengan konsep *techno-sociopreneurship*. Dengan penerapan model ini, maka usaha kewirausahaan pertanian berbasis kelembagaan ekonomi lokal akan bisa mencapai skala ekonomi yang lebih baik dan meningkatkan skala usaha. *Novelty* penelitian ini akan dapat berkontribusi dalam pembangunan pertanian melalui kewirausahaan dalam kelembagaan ekonomi lokal dengan mempotensikan aspek sosial dan aspek teknologi sebagai model meningkatkan skala usaha wirausaha pertanian pada kelembagaan ekonomi lokal.

1.7 Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Diduga inovasi berpengaruh positif signifikan terhadap kelembagaan ekonomi lokal KPSU Solok Radjo.

2. Diduga kolaborasi berpengaruh positif signifikan terhadap kelembagaan ekonomi lokal KPSU Solok Radjo.
3. Diduga budaya berpengaruh positif signifikan terhadap kelembagaan ekonomi lokal KPSU Solok Radjo.
4. Diduga inovasi berpengaruh positif signifikan terhadap *techno-sociopreneurship* di KPSU Solok Radjo.
5. Diduga kolaborasi berpengaruh positif signifikan terhadap *techno-sociopreneurship* di KPSU Solok Radjo
6. Diduga budaya berpengaruh positif signifikan terhadap *techno-sociopreneurship* di KPSU Solok Radjo
7. Diduga *techno-sociopreneurship* berpengaruh positif signifikan terhadap kelembagaan ekonomi lokal KPSU Solok Radjo.
8. Diduga *techno-sociopreneurship* memediasi hubungan antara inovasi dan kelembagaan ekonomi lokal KPSU Solok Radjo.
9. Diduga *techno-sociopreneurship* memediasi hubungan antara variabel kolaborasi dan kelembagaan ekonomi lokal KPSU Solok Radjo.
10. Diduga *techno-sociopreneurship* memediasi hubungan antara budaya dan kelembagaan ekonomi lokal KPSU Solok Radjo.

